

JURNAL
“RESPON AMERIKA SERIKAT TERHADAP PENINGKATAN
KERJASAMA MILITER TIONGKOK – RUSIA
ERA XI JINPING”

Oleh : Irhan Riskiarto (20150510361)
Dosen Pembimbing : Ali Muhammad, S.IP., M.A., Ph.D.
Jurusan Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
2019

ABSTRAK

Kerjasama militer yang semakin intens antara Tiongkok dengan Rusia menuai respon dari pihak pemerintahan Amerika Serikat. Hal ini dikarenakan adanya aktivitas militer dari kerjasama antara kedua negara tersebut yang difokuskan di kawasan Asia Pasifik ini secara langsung memicu kekhawatiran Amerika Serikat pada saat ini. Dalam menganalisa terhadap respon Amerika Serikat, menggunakan teori neorealisme sebagai landasan dalam menganalisisnya yang dilengkapi dengan beberapa konsep seperti politik luar negeri, balance of power dan security dilemma. Metode penulisan yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan beberapa data dengan studi pustaka. Data yang didapatkan berasal dari beberapa karya tulis ilmiah, jurnal, artikel, buku, dokumen pemerintahan, dan website media online. Setelah data – data yang dibutuhkan terkumpul kemudian diolah dan diinterpretasikan ke dalam sebuah pemaparan tulisan. Berdasarkan hasil dari penelitian ini yaitu, terdapat beberapa respon Amerika Serikat terhadap peningkatan kerjasama militer Tiongkok dengan Rusia. Antara lain penguatan bilateral dengan negara sekutu di kawasan Asia Pasifik. Selain itu, meningkatkan anggaran militer serta kapabilitas militernya. Kemudian, dan strategi militer.

Kata Kunci : Respon AS, Kerjasama Militer, Tiongkok – Rusia, Alutsista, Asia Pasifik.

PENDAHULUAN

Respon Amerika Serikat terhadap peningkatan kerjasama militer Tiongkok dengan Rusia di era Presiden Xi Jinping.

Kerjasama militer yang semakin intens yang terjalin antara Tiongkok dengan Rusia mendapatkan beberapa respon dari pihak Amerika Serikat yang difokuskan di kawasan Asia Pasifik. Hal ini

dikarenakan beberapa peningkatan aktivitas militer dari kerjasama kedua negara tersebut secara langsung memicu kekhawatiran Amerika Serikat.

Kawasan Asia Pasifik dewasa ini merupakan salah satu kawasan yang strategis dan lebih memiliki peran dalam geopolitik dunia. Banyak sekali negara yang mulai terlibat memainkan kepentingannya di kawasan Asia Pasifik. Salah satunya yaitu Amerika Serikat. Pada pemerintahan presiden Amerika Serikat ke-45 yaitu Donald Trump berambisi berfokus pada Asia Pasifik sebagai salah satu kawasan yang paling penting bagi masa depan Amerika Serikat, baik secara politik maupun dari segi ekonomi serta keamanan dunia.

Sebagai Negara super power, Amerika Serikat merasa memiliki peranan dalam mengatur kestabilan kawasan yang tertuang di dalam pilar keamanannya (Nation:57). Upaya Amerika Serikat untuk mengatur kestabilan kawasan terdapat beberapa tindakan serta meliputi kebijakan aliansi pertahanan yang dibentuk dengan melibatkan Jepang yang tergabung dalam “*Security Consultative Commintee*” pada tahun 2016. Dalam konteks ini, Amerika Serikat menekankan keperluan untuk memperluas kerjasama bilateral dan juga berbagi informasi dalam rangka merespon terhadap tantangan keamanan yang muncul. Oleh karena itu, Amerika Serikat

merangkul Jepang sebagai aliansinya di kawasan untuk bersama-sama menjaga kestabilan tatanan Internasional.

Di lain sisi, Tiongkok saat ini ingin menjadi kekuatan baru telah menciptakan sebuah kompetisi peningkatan kekuatan (*power*). Sebagaimana yang dinyatakan oleh Presiden Xi Jinping yang menginginkna keseriusannya dalam meningkatkan kekuatan militer Tiongkok yang sejalan dengan pertumbuhan serta pembangunan perekonomian Tiongkok.

Presiden Xi Jinping mengatakan “ *untuk memperkuat pertahanan nasional serta kekuatan bersenjata yang menempati tempat penting dalam keseluruhan pengaturan dan juga menjadi penyebab sosialisme dengan karakteristik Tiongkok. Mengingat keseluruhan kepentingan strategis keamanan nasional serta keamanan nasional, mempertimbangkan, dan membuat negara kita makmur dan angkatan bersenjata kita kuat dan membangun masyarakat cukup sejahtera dalam segala hal.*”

Oleh Karena itu, Tiongkok memiliki kebijakan berupa peningkatan dibidang militer secara masif. Untuk mengintegrasikan kepentingan nasionalnya, Tiongkok melakukan kerjasama militer dengan Rusia. Peningkatan kerja sama Tiongkok dan

Rusia mengindikasikan tekad serius Presiden Xi Jinping, untuk memperkuat kerja sama negara itu dengan negara-negara seperti Rusia. Alasan Tiongkok memilih Rusia sebagai mitranya karena kedua negara ini memiliki ideology komunisme yang tak jauh berbeda, dan juga karena pertimbangan Tiongkok atas majunya kekuatan militer Rusia yang sudah terbukti telah menempati urutan kedua kekuatan militer terkuat di dunia setelah Amerika Serikat.

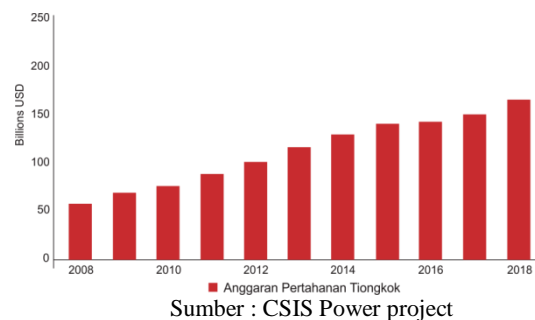
Selain itu, hubungan Tiongkok dengan Rusia telah terjalin sangat lama semenjak Rusia masih tergabung dalam Uni Soviet. Hubungan kerjasama diantaranya mencangkup dimensi luas mulai dari teknologi, pendidikan, ekstradisi penjahat, pendidikan tinggi dan komunikasi, serta paling dominan yaitu kerjasama di bidang militer. Kemitraan strategis di bidang militer antara Tiongkok dengan Rusia mulai masif pada tahun 2007. Kedua Negara tersebut melakukan *diversifikasi dan intensifikasi* kerjasama militer.

Diversifikasi yang dilakukan antara kedua negara yaitu berupa perluasan dan modernisasi alutsista yang dimiliki Tiongkok. Diversifikasi ini dilakukan dengan pembelian senjata serta alutsista Rusia yang dilakukan Tiongkok. Pada tahun 2007, Tiongkok membeli senjata utama andalan Rusia yaitu Kalashnikov

atau AK 47 dan rudal atau RPG Anti-Tank serta membeli 55 Helikopter jenis Mi-17 dan sistem pertahanan rudal.

Dalam melakukan intensifikasi, Tiongkok serta Rusia memfokuskan dalam hal peningkatan latihan militer bersama. Yaitu latihan dalam menangani kegiatan anti terorisme serta keamanan negara yang diikuti sekitar 300.000 tentara yang tergabung dalam latihan militer tersebut. Latihan bersama ini diberi nama “Vostok 2018”.

Grafik. A.1 Pengeluaran Anggaran Militer Tiongkok (data tahun 2018)



<https://chinapower.csis.org/military-spending/>, diakses pada 23 Mei 2019

Total anggaran militer Tiongkok naik sekitar nominal 12,2% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Keputusan China untuk meningkatkan anggaran pertahanan sebesar 12,2 % menjadi sekitar USD 175 miliar (sekitar 2.500 triliun rupiah) untuk tahun 2018. Pesatnya pertumbuhan anggaran pertahanan Tiongkok menjadi tanda bahwa Tiongkok berhasrat untuk mendominasi kehadiran militer di Asia Pasifik terutama angkatan

lautnya. Tahun lalu, Angkatan Laut Tiongkok telah mengerahkan kapal induk pertamanya, Liaoning, ke laut yang dibeli dari Ukraina dan dibangun kembali oleh Tiongkok. Belum lagi pertumbuhan pesat kapal perang dan kapal selam Tiongkok baik dari segi kuantitas maupun kualitas yang cukup mengejutkan Amerika Serikat.

Tiongkok berambisi besar untuk lebih meningkatkan kemampuan militernya lagi sekaligus sebagai tanda sinyal kuat dari Presiden Xi Jinping bahwa Tiongkok tidak akan mundur dari ketegasannya untuk terus meningkatkan kekuatan di Asia, terutama di perairan Asia Pasifik yang disengketakan.

Modernisasi militer atau angkatan bersenjata Tiongkok menjadi salah satu alasan penting bagi Tiongkok dalam meningkatkan anggaran belanja militer. Berdasarkan latar belakang tersebut menarik untuk diteliti tentang respon Amerika Serikat terhadap kerjasama Tiongkok dengan Rusia. Sebagaimana yang sudah disebutkan di awal, bahwa Amerika Serikat mempunyai kepentingan di kawasan Asia Pasifik, baik secara politik maupun dari segi ekonomi serta keamanan dunia yang tertuang didalam kebijakan “*Rebalance*” Amerika Serikat. Akan tetapi munculnya kehadiran kerjasama militer Tiongkok dengan Rusia dianggap cukup menjadi penghambat bagi

keberhasilan pencapaian kepentingan Amerika Serikat di kawasan Asia Pasifik.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka secara terperinci masalah yang akan dibahas adalah kebijakan amerika serikat terhadap peningkatan kekuatan militer Tiongkok dengan Rusia. Dari masalah diatas, penulis tertarik pada satu pertanyaan penelitian, yaitu :

“Mengapa Amerika Serikat khawatir terhadap tindakan kerjasama militer antara Tiongkok dengan Rusia?”

Landasan Teori

Dalam menelaah topik dan permasalahan yang telah disebutkan di atas, penulis akan menggunakan landasan teori Politik Luar Negeri, Sistem Internasional serta Security Dilemma.

1. Politik Luar Negeri

Penulis mengidentifikasi pembahasan ini dengan menggunakan teori politik luar negeri. Politik luar negeri merupakan suatu kebijakan, sikap, dan langkah – langkah yang dilakukan oleh suatu Negara dalam melakukan hubungan luar negerinya dengan Negara lain, baik dengan organisasi internasional, dan subjek hukum internasional lainnya, dengan tujuan untuk mencapai

kepentingan Negara yang melakukan politik luar negeri tersebut. Politik luar negeri dapat menjadi pedoman bagi sebuah Negara dalam menjalankan tindakan yang akan dilakukannya jika berhubungan dengan Negara lain, agar tujuan nasional negaranya dapat tercapai. Secara umum, politik luar negeri (*foreign policy*) merupakan strategi suatu negara dalam berhubungan dengan negara lain berdasarkan nilai, sikap, arah serta sasaran untuk kepentingan nasional negara tersebut di dalam percaturan dunia internasional. Oleh karena itu, setiap negara mempunyai kebijakan politik luar negeri sendiri tergantung pada tujuan nasional negara.

Politik luar negeri merupakan strategi atau rencana tindakan yang dibentuk oleh para pembuat keputusan suatu negara dalam menghadapi negara lain atau unit politik Internasional lainnya, dan dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional spesifik yang dituangkan dalam terminologi kepentingan nasional. Dalam pembuatan kebijakan atau keputusan disini, para pembuat keputusan atau pemerintah tidak dengan begitu saja memutuskan. Setidaknya ada beberapa tahapan yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam memutuskan suatu kebijakan luar negeri.

Menurut William D. Coplin, kebijakan luar negeri merupakan sebuah keputusan yang didahului oleh sebuah

proses di mana ada tuntutan dari domestic politics, dengan melihat kemampuan dari kekuatan ekonomi dan militer. Faktor-faktor tersebut kemudian mempengaruhi para pembuat kebijakan, yang kemudian meramunya menjadi sebuah kebijakan luar negeri dalam merespon situasi internasional.

“...Apabila kita akan menganalisa kebijakan luar negeri suatu negara, maka kita harus mempertanyakan para pemimpin negara dalam membuat kebijakan luar negeri. Dan salah besar jika menganggap bahwa para pemimpin negara (para pembuat kebijakan luar negeri) bertindak tanpa pertimbangan (konsiderasi). Tetapi sebaliknya, tindakan luar negeri tersebut dipandang sebagai akibat dari tiga konsiderasi yang *mempengaruhi para pengambil kebijakan luar negeri...*”

Dalam kasus ini, Tiongkok menerapkan kebijakan luar negerinya, serta lebih mengutamakan kepentingan nasionalnya, tapi dilain sisi mereka juga mempertimbangkan aspek-aspek penting lain, terutama ekonomi.

2. *Balance of Power*

Balance of power merupakan salah satu konsep yang paling mendasar dalam hubungan internasional dan merujuk pada

suatu kondisi equilibrium diantara bangsa – bangsa. Neorealisme beranggapan bahwa balance of power akan muncul ketika ketidak adaan suatu kebijakan yang ditujukan untuk mengatur keseimbangan. Perimbangan kekuasaan politik berlangsung pada dua syarat yang terpenuhi, yaitu bahwa tatanan itu bersifat anarkis dan tatanan itu dipenuhi oleh unit yang ingin terus bertahan hidup.

Oleh karena itu, penulis memandang bahwa balance of power sebagai bagian dari upaya untuk mencegah munculnya power atau kekuatan yang dominan pada suatu kawasan. Dalam konsep balance of power memainkan peran kunci dalam neorealisme (Jacobsen:2013). Sehingga balance of power dibutuhkan di dalam sistem internasional, karena mampu membuat atau menciptakan kestabilan kawasan apabila muncul kekuatan baru. Balance of power adalah satu – satunya cara untuk memelihara perdamaian (Waltz:2004,h.6). Balance of power sama pentingnya seperti kendaraan lapis baja serta senjata nuklir sebagai asset militer yang dimiliki negara (Mearsheimer:2001).

Sehingga dalam hal ini, penulis sepakat dengan asumsi neorealisme yang menganggap bahwa konsep balance of power merupakan sebuah strategi keamanan yang sangat efektif dalam menciptakan stabilitas keamanan dan

keseimbangan sistem internasional. Berdasarkan asumsi tersebut, Amerika Serikat ingin menciptakan suatu suasana stabil di kawasan Asia Pasifik dan berupaya mencegah power atau kekuatan baru di kawasan Asia Pasifik dengan mengimbangi kekuatan Tiongkok dan Rusia di kawasan tersebut.

3. *Security Dilemma*

Security Dilemma adalah salah satu konsep dalam teori realisme yang muncul akibat adanya aksi dari suatu negara untuk meningkatkan keamanan negaranya, yang juga dikenal sebagai *spiral mode* (mode spiral) kerap digambarkan sebagai suatu keadaan atau situasi di mana tindakan yang diambil oleh negara yang memperkuat sistem pertahanan dan keamanannya, seperti meningkatkan kekuatan militer atau pun membentuk aliansi dengan negara lain. Hal ini seperti yang dijelaskan dalam konsep keamanan sebelumnya yaitu dapat terjadi karena suatu negara merasa terancam terhadap kekuatan yang dimiliki oleh negara lain sehingga berusaha untuk meningkatkan persenjataan dan pertahanannya yang berakhir dengan suatu keadaan dimana negara-negara berlomba-lomba untuk memproduksi senjata. (Jervis:1994)

Merujuk pada sistem internasional yang bersifat anarki, masing-masing negara membutuhkan

kekuatan/*power* dan juga keamanan. Setiap negara merasa wajib memiliki sarana/instrumen kekuatan baik utama maupun pendukung, seperti kekuatan militer dan persenjataan, sebagai bukti bahwa sebuah negara memiliki kekuatan, dan juga sebagai alat pertahanan demi menjamin keamanan suatu negara dari ancaman kekuatan negara lain, terlebih dari serangan luar. Dengan kondisi yang anarki tersebut, negara kemudian menganggap bahwa keamanan merupakan *first concern*.

Security dilemma juga timbul karena ada rasa curiga atas keamanan dan akumulasi kekuatan Negara lainnya, sehingga mendorong negara untuk meningkatkan lagi dan lagi kekuatannya agar terhindar dari dampak kekuatan pihak lainnya karena mereka sendiri juga memiliki kekuatan tersebut. (John:1950).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kawasan Asia Pasifik merupakan wilayah dengan cakupan beberapa negara yang memiliki sistem politik yang berbeda – beda pula. Asia pasifik menjadi wilayah yang menjadi perebutan dua paham besar, yaitu paham komunisme dan paham liberalisme. Amerika Serikat dan Jepang merupakan negara dominan yang memiliki sistem politik demokrasi liberal. Sedangkan Tiongkok berasaskan sistem

politik otoriter di bawah partai komunisme. Dan sejumlah negara – negara di Timur Laut dan Asia Tenggara didasarkan pada prinsip – prinsip demokrasi (Mcdougall:2007,h.19).

Terdapat aspek politik lainnya dari pentingnya kawasan Asia Pasifik bagi Amerika Serikat, yaitu seperti penyebaran nilai – nilai demokrasi dan liberalism. Kawasan Asia Pasifik juga merupakan wilayah yang di dalamnya memiliki peran penting bagi Amerika Serikat di dalam tahapan demokratisasi beberapa negara di kawasan Asia Pasifik, salah satunya yaitu korea selatan yang mengalami transisi demokrasi di bawah pengaruh Amerika Serikat. Secara keseluruhan peran atau pengaruh Amerika Serikat di dalam demokrasi korea Selatan tidak dapat diabaikan dari sejarah pasca Perang Dunia Kedua (Kie-Chiang:1969h.164).

perilaku Tiongkok serta Rusia dikhawatirkan dapat mengganggu stabilitas kawasan, karena Tiongkok memiliki beberapa kepentingan diantaranya untuk menjadi kekuatan atau power baru di kawasan Asia Pasifik yang dimana akan mengganggu posisi Amerika Serikat yang awalnya telah ada di kawasan tersebut bersama aliansinya. Pergeseran status posisi Amerika Serikat di kawasan tersebut tentu berdampak pula pada terganggunya kepentingan Amerika Serikat di Asia Pasifik.

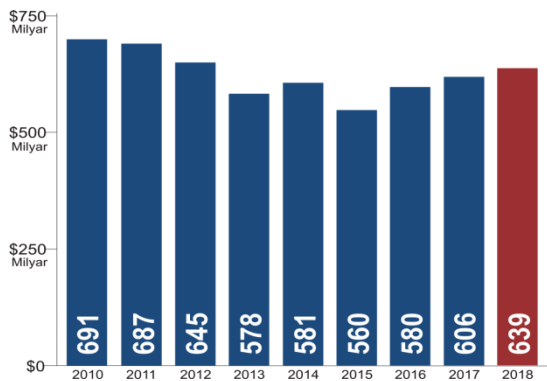
Tekanan dari sistem internasional ini terbukti dari intensnya kerjasama militer yang dibangun oleh Tiongkok dengan Rusia, sehingga menimbulkan kekhawatiran Amerika Serikat, terutama terhadap keberlangsungannya dalam kepentingan nasional Amerika Serikat di kawasan Asia Pasifik. Oleh karena itu, Amerika Serikat juga akan terus memaksimalkan kekuatan militernya yang dimana menjadi kapabilitas suatu negara didasarkan atas besarnya tekanan eksternal yang berasal dari sistem internasional, serta terdapat keinginan untuk bertahan hidup di dalam lingkungan internasional, terlebih di kawasan Asia Pasifik.

pemerintahan Amerika Serikat yang lebih memfokuskan pada peningkatan kapabilitas kekuatan militernya di kawasan Asia Pasifik yaitu untuk menghambat laju pergerakan Tiongkok dengan Rusia. Menurut Gideon Rachman pada artikel yang berjudul *Director of Foreign Affairs* di Financial Times, menyatakan bahwa kerjasama militer antara Tiongkok dengan Rusia merupakan tanda bahwa Tiongkok dan Rusia terlihat ingin mendorong kembali dominasi Amerika Serikat. Di lain sisi, Tiongkok dan Rusia tidak menyetujui

kebijakan Amerika Serikat yang melakukan penempatan 60 persen angkatan lautnya di kawasan Asia Pasifik serta dominasi Amerika Serikat yang memiliki beberapa aliansi di kawasan tersebut. Akan tetapi dengan semakin adanya hubungan kerjasama kedua negara tersebut memang ditujukan untuk mengimbangi dominasi Amerika Serikat dengan sekutunya di kawasan Asia Pasifik. Dalam hal tersebut, Tiongkok dan Rusia memiliki rasa ketidaksukaan yang sama kepada Amerika Serikat dikarenakan merasa terancam atas promosi nilai – nilai demokrasi di kawasan Asia Pasifik. Serta ketidaksukaan intervensi Amerika Serikat serta gagasannya mengenai dunia unipolar yaitu persebaran kekuasaan dalam sistem internasional.

Respon pemerintah Amerika Serikat memang tak jauh berbeda dengan apa yang dilakukan oleh pemerintahan Tiongkok dan Rusia. Apabila pemerintah Tiongkok meningkatkan anggaran belanja dalam bidang pertahanan militernya untuk membeli alutsista dari Rusia, hal ini juga dilakukan pemerintahan Amerika Serikat. Grafik dibawah ini merupakan pengeluaran anggaran militer Amerika Serikat.

**Grafik IV.A. Pengeluaran
Anggaran Militer Amerika Serikat per
Milyar Dollar AS.**



Sumber : U.S Department Of Defense
United States of America.

https://dod.defense.gov/News/Special-Reports/0518_budget/, diakses 18 Maret 2017.

Pada grafik tersebut terlihat adanya kenaikan kembali yang sangat signifikan anggaran militer Amerika Serikat setelah pada tahun 2015 yaitu di tahun 2018 menjadi 639 Milyar Dollar AS. Grafik ini membuktikan bahwa Amerika Serikat benar – benar serius meningkatkan anggaran militernya yang sangat signifikan pasca adanya peningkatan kerjasama militer antara Tiongkok dengan Rusia.

Peningkatan anggaran militer tersebut terjadi paling besar pada pertahanan angkatan udara Amerika Serikat, yaitu berupa modernisasi dan peningkatan sistem keamanan udaranya yaitu sebesar 183 Milyar Dollar AS. Serta pada sistem pertahanan lautnya sebanyak 180 Milyar Dollar AS, serta pada sistem modernisasi di angkatan militer darat

sebanyak 166 Milyar Dollar AS. Dan juga pembaharuan teknologi serta modernisasi persenjataan dalam pertahannya sebesar 110 Milyar Dollar AS.

Amerika Serikat perlu menjalani perubahan dramatis untuk mempersiapkan kemungkinan serangan dari Rusia dan China. Hal ini direspon oleh Amerika Serikat melalui strateginya. Yaitu membentuk suatu badan yang bergerak khusus dalam menjaga keamanan regional, khususnya di kawasan Asia Pasifik, yang bernama United State Pacific Command (USPACOM), yaitu suatu komando tempur gabungan dari angkatan bersenjata Amerika Serikat yang berada dibawah naungan departemen pertahanan Amerika Serikat, yang dipimpin seorang Panglima Besar Komando Pasifik yaitu komandan Admiral Philip S. Davidson. Upaya lainnya diwujudkan dalam hubungan multilateral untuk dialog keamanan sebagai wadah Amerika Serikat untuk bargaining power dan bargaining position yang menguntungkan. Amerika Serikat juga meningkatkan kemitraan aliansi dengan negara-negara di kawasan Asia Pasifik guna menjamin kepentingan AS di Asia Pasifik terlindungi.

KESIMPULAN

Hubungan antara Tiongkok dengan Rusia yang sangat erat sudah terjalin semenjak tahun 1991 saat terbentuknya

Federasi Rusia. Kedua negara ini memiliki ideology komunisme yang tak jauh berbeda. Setahun terbentuknya Federasi Rusia, dimulainya kesepakatan dalam penjualan senjata serta alutsista antara Tiongkok dengan Rusia. Tiongkok dan Rusia memiliki beberapa persamaan pandangan terutama mengenai kekuatan Amerika Serikat di kawasan Asia Pasifik. Oleh karena itu, peningkatan militer Tiongkok pun di tingkatkan setelah menjajaki kebangkitan ekonomi negaranya bersama dengan kekuatan militernya.

Sejak runtuhnya Uni Soveit dan berganti dengan terbentuknya Federa Rusia, Rusia mengembangkan dibidang industri militernya yang dimana menjadi keunggulan komparatif bagi negaranya. Oleh karena itu, Rusia mampu untuk memenuhi permintaan produksi senjata serta alutsista bagi pemerintahan Tiongkok. Sebaliknya Tiongkok menganggap Rusia memiliki kepentingan yang sama dalam kerjasama militer yang dijalin bersama. Kerjasama militer Tiongkok dengan Rusia merupakan suatu bentuk external balancing di kawasan Asia Pasifik. peningkatan kerjasama ini diharapkan tidak mengarah pada perang, melainkan merupakan suatu awal perubahan dunia yang lebih multipolar..

Setelah Perang Dingin usai, Amerika Serikat tidak pernah merasa benar – benar mendapatkan ancaman

secara militer. Namun setelah adanya hubungan kerjasama peningkatan kerjasama militer Rusia dan Cina yang semakin kuat dan berkembang hingga saat ini, AS mulai merasa terancam dan mulai aktif meningkatkan kekuatan militernya. Hal tersebut memicu kekhawatiran bagi Amerika Serikat. kekuatan militer Rusia berada di urutan kedua setelah Amerika Serikat di peringkat pertama. Di sini dapat dilihat bagaimana Rusia berusaha mengimbangi kekuatan militer Amerika Serikat. Tiongkok juga berada di peringkat ketiga setelah Rusia. Ini merupakan bukti bahwa Tiongkok juga mulai perlahan – lahan meningkatkan kekuatan militernya.

Kerjasama antara Tiongkok dengan Rusia dirasa dapat mengancam kepentingan nasional Amerika Serikat serta ketidak kestabilan sistem internasional di kawasan Asia Pasifik. Betapa khawatirnya Amerika Serikat terhadap aktivitas peningkatan kerjasama militer antara kedua negara tersebut. Oleh karena itu, terdapat tiga kebijakan yang dilakukan oleh Amerika Serikat dalam merespon kerjasama tersebut. Respon tersebut diantaranya mencakup penguatan kerjasama bilateral dengan negara aliansi atau sekutu dikawasan Asia Pasifik, peningkatan anggaran militer serta kapabilitas militer Amerika Serikat serta strategi militer.

Dimana dalam kerjasama penguatan dengan negara aliansi mendapat respon yang baik dari negara aliansi, dikarenakan secara bersamaan muncul rasa khawatir atas kebangkitan Tiongkok di Kawasan Asia Pasifik yang merupakan ancaman juga bagi negara – negara sekutu Amerika Serikat, maka dari itu mereka meminta perlindungan dari Amerika Serikat. Selanjutnya dalam peningkatan anggaran militer serta kapabilitas militer guna untuk menandingi maupun menekan kekuatan militer Tiongkok yang dimana mengalami memodernisasi kekuatan militernya. Yang terakhir strategi militer Amerika Serikat guna untuk mengetahui seberapa kuat kapabilitas militer kedua negara tersebut serta untuk mencegah kekuatan baru yang terbentuk di kawasan Asia Pasifik. Tindakan tersebut ditempuh untuk mempertahankan kepentingan nasional pemerintahan Amerika Serikat serta balance of power di kawasan Asia Pasifik.

REFENSI

BUKU

Nainggolan, P. P. (2012). *Perkembangan Strategi Militer Amerika Serikat di Asia Pasifik*. 103.

Dewan, S. (2013). *China's Maritime Ambitions and the PLA Navy*. New Delhi: Vij Books.

Dikarma, K. (2018). *AS Ingin Membendung Pengaruh Tiongkok di Asia Tenggara*. Jakarta: Republika.

Przystup, J. J. (2009). The United States and the Asia-Pacific Region: National Interests and Strategic Imperatives. *Strategic Forum*, 239.

Rachmat, A. N. (2018). *Konstruksi Identitas dalam Kepentingan Maritim Tiongkok terkait*, 14.

SUMBER PEMERINTAHAN

Kemenlu RI. (t.thn.). Diambil kembali dari: https://kemlu.go.id/ptriasean/id/pages/asean_plus_three/978/etc-menu diakses 12 Januari 2019.

Hurricanes Harvey, I. a. (2017). *Department of Defense Details in support of FY 2018 Budget Amendment Request*. Retrieved from Under Secretary of Defense: <https://comptroller.defense.gov/Budget-Materials/Budget2018/>, diakses 15 februari 2019.

Japan-USA Relations. (2016, April 13). Retrieved from Ministry of Foreign Affairs of Japan: (<https://www.mofa.go.jp/region/n-america/us/security/arrange.html>)

Budget, D. o. (2017, November). *MILITARY PERSONNEL PROGRAMS (M-1)*.

Retrieved from Under Secretary of Defense:

https://comptroller.defense.gov/Portals/45/Documents/defbudget/fy2018/November2017Amended/fy2018_m1a.pdf

WEBSITE

BBC News. (2013, Maret 25). Retrieved from China 'buys fighter jets and submarines from Russia':

<https://www.bbc.com/news/world-asia-21930280>, diakses 28 September 2018.

SIPRI: Penjualan Senjata dan Peralatan Militer Global Meningkat Lagi. (2017, Desember 11). Retrieved from DW: <https://www.dw.com/id/sipri-penjualan-senjata-dan-peralatan-militer-global-meningkat-lagi/a-41742971>, diakses 13 Januari 2019.